

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Fatimah Az Zahrah

Magister Sains Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman

Muhammad Rafi Zaen

Magister Sains Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman

Salma Putri Mellinia

Magister Sains Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman

Alamat: Jl. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708, Grendeng, Purwokerto

Korespondensi penulis: fatimah.zahrah@mhs.unsoed.ac.id

Abstract. *The research aims to determine and analyze the influence of local revenue, audit opinions and capital expenditure on regional financial performance in districts/cities in East Java province. The data processed is secondary data taken from the 2018-2021 District/City Regional Government Financial Reports (LKPD) of East Java Province with a sample size of 38 districts/cities using the documentation method. The method used in this research is the panel data regression analysis method using the IBM SPSS version 26 application. The research results found that local revenue has a positive and significant effect on local government financial performance, audit opinion has a positive but not significant effect on local government financial performance, and capital expenditure has no and no significant effect on local government financial performance.*

Keywords: *Local Revenue, Audit Opinion, Capital Expenditure, Local Government Financial Performance*

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, opini audit, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Data yang diolah merupakan data sekunder yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2021 dengan jumlah sampel sebanyak 38 kabupaten/kota melalui penggunaan metode dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel menggunakan IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, opini audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan belanja modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

LATAR BELAKANG

Pemerintah membuat kebijakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola aparaturnya sendiri dan menjalankan urusan pemerintahannya sendiri. Menurut UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan arah dan tujuan yang jelas untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur tahun 2020, BPK telah menemukan bahwa penyajian kas di bendaharawan sebesar Rp 107.097.212.169,00 melanggar Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Honorarium, uang saku, makan minum bantuan sosial, barang pakai habis (ATK, obat-obatan, alat kebersihan, alat kesehatan, makan minum petugas, APD), dan bansos (sembako, uang tunai) adalah beberapa jenis pengeluaran. BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021. Selama tidak ada masalah dengan Rp 107 miliar, pendapat tersebut dapat dianggap wajar secara universal. Selain masalah sebesar Rp 107 miliar, audit BPK terhadap LKPD Jember 2021 juga menemukan beberapa masalah lain. Misalnya, honor tim pelaksana kegiatan yang berlebihan sebesar Rp 153,629 juta dan pemborosan uang daerah sebesar Rp 1,237 miliar. Selain itu, ada kekurangan 24 pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air. Selain itu, ada kekurangan penatausahaan barang milik daerah yang terdiri dari aset tetap. Akibatnya, ada kelebihan pembayaran sebesar Rp 2,067 miliar. Penyusutan yang dilaporkan pada neraca tahun 2021 dan nilai aset tetap mungkin tidak sesuai dengan nilai wajar (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kinerja merupakan hasil dari tindakan yang telah dicapai melalui penggunaan anggaran dalam kuantitas dan kualitas yang dapat diukur. Keuangan daerah terdiri dari semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat diukur dengan uang, serta segala jenis kekayaan yang dapat dimiliki daerah sesuai dengan hak dan kewajiban daerah. Sementara itu, kinerja keuangan merupakan suatu pencapaian yang diperoleh organisasi dalam periode tertentu (Nugroho & Prasetyo, 2018). Peran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting bagi pemerintah daerah dan pihak yang membutuhkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat dilihat melalui rasio efektivitas. Rasio efektivitas merupakan keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Susanto, 2019).

Kinerja keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bentuk penerimaan yang diterima daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri dan dipungut sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Sari & Halmawati, 2021). Pendapatan Asli Daerah berpengaruh besar pada kinerja keuangan. PAD memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap APBD, apabila pemerintah daerah tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Maulina *et al.*, (2021) mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan. Artinya bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka menunjukkan pengelolaan sumber daya yang baik. Kemudian Putri & Amanah (2020) juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Artinya bahwa apabila pendapatan asli daerah meningkat, pemerintahan dan pelayanan masyarakat akan lebih baik. Hal ini akan memberikan dampak positif pada kinerja keuangan yang baik karena pemerintah daerah memiliki kemandirian yang baik.

Berbeda dengan hasil penelitian Putri dan Darmayanti (2019) yang memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Artinya bahwa pemerintah daerah yang memiliki PAD yang tinggi tetapi tidak diikuti dengan kinerja keuangan yang baik, maka Pemerintah Daerah harus dapat memperbaiki untuk kedepannya. Pemerintah daerah juga harus mampu mengidentifikasi dan memahami potensi sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya, sehingga mereka dapat mengoptimalkan semua potensi pendapatan daerah.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu Opini Audit. Opini Audit merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan (Rasyid *et al.*, 2022). Opini audit dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah. Opini audit membantu pemakai laporan keuangan menilai keberlangsungan hidup bisnis, resiko investasi, dan kewajaran kegiatan operasi (Haryanto & Sudarno, 2019).

Penelitian Kusumasari dan Kartika (2022) memperoleh hasil bahwa Opini audit memiliki berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan opini audit BPK merupakan hasil dari pemeriksaan laporan keuangan yang lebih menekankan pada hasil wajar dalam penyajian keuangan dan tidak berfokus pada kinerja keuangan. Sejalan dengan penelitian Pradnyani dan Mimba (2020) yang juga menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa opini audit BPK mampu menjadi indikator untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Artinya, semakin baik opini audit BPK, maka semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah.

Namun, berbeda dengan penelitian Rasyid *et al.*, (2022) yang memperoleh hasil bahwa adanya pengaruh negative antara opini audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya bahwa semakin meningkat atau menurunnya opini audit yang diberikan oleh BPK, tidak selalu meningkatkan kinerja pemerintah daerah, karena masih ada masalah dalam pengelolaan

keuangan daerah.. Sebagai auditor pemerintah, BPK lebih menekankan kewajaran laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal, catatan akuntansi, dan pemeriksaan akun-akun.

Faktor ketiga yaitu Belanja Modal. Belanja modal adalah belanja yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan aset tetap dan biasanya dilakukan oleh otoritas publik (Atmoko & Khairudin, 2022). Belanja modal adalah jenis belanja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan keuntungan dan kemakmuran daerah selama lebih dari satu tahun anggaran (Djarmika, 2022).

Penelitian Sari dan Mustanda (2019) memperoleh hasil bahwa adanya pengaruh positif antara belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung periode 2013 -2017. Artinya semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian Wahyudin dan Hastuti (2020) belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. Karena tidak semua aktivitas belanja modal mampu menghasilkan sumber daya keuangan secara langsung bagi daerahnya, faktor yang mengakibatkan belanja modal belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berbeda dengan penelitian Antari dan Sedana (2018) memperoleh hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015. Artinya bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Selain itu, tidak semua kegiatan belanja modal dapat menghasilkan sumber keuangan secara langsung bagi daerah merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan belanja modal berdampak negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal dinilai berdasarkan berbagai faktor, termasuk pendapatan daerah, kualitas produk yang diharapkan, produksi dalam jumlah yang dibutuhkan, pelaksanaan tepat waktu, pengaruh pada kepentingan publik, dan biaya yang dikeluarkan.

Teori agensi menyatakan bahwa di antara pihak-pihak yang berkepentingan, pemilik dan pengelola, sejak perusahaan publik melakukan pemisahan antara keduanya, terdapat asimetri informasi antara kedua pihak tersebut. Rakyat (prinsipal) akan memantau perilaku pemerintah dan menyeimbangkan antara target yang diinginkan dengan target pemerintah. Dalam pelaksanaan pemantauan tersebut rakyat menuntut pemerintah guna

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diberikan kepada pemerintah melalui pelaporan keuangan secara berkala.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur? (2) Apakah Opini Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur? (3) Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap positif kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, (2) untuk menganalisis pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, (3) untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut teori agensi, suatu kontrak terbentuk antara pemilik modal (prinsip) dan pengelola modal (agen). Pemilik modal dan agen masing-masing akan berkonsentrasi pada tujuan mereka dalam *going concern* perusahaan, sedangkan pemilik modal akan berkonsentrasi pada kebahagiaannya dalam mengelola perusahaan. *Agent* dapat melakukan hal-hal yang merugikan perusahaannya untuk mencapai keinginannya, seperti salah saji atau kecurangan (Endiana & Suryandari, 2021). Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi konflik kepentingan dalam hubungan agensi. Perlu diingat bahwa egoisme setiap individu—dalam hal ini prinsipal dan agen—adalah penyebab utama masalah keagenan (Triyuwono, 2018).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengelolaan keuangan, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan strategi pemerintah, menunjukkan seberapa berhasil atau tidak pelaksanaan tujuan atau sasaran organisasi. Sistem ini juga menunjukkan seberapa berhasil atau tidak pelaksanaan operasi sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Nasution, 2019). Dengan kata lain, setelah pembentukan sistem pengelolaan keuangan, perlu dibuat sarana untuk mengukur kinerja keuangan serta pengawasan pemerintahan. Ini dilakukan untuk menghindari masalah seperti ketidakpastian hukum dan stabilitas politik, ketidakjelasan kebijakan pembangunan,

dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pengukuran kinerja keuangan terkait erat dengan akuntabilitas (Nasution, 2019). Pemerintah daerah, yang bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, harus memberikan laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan mereka.

Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sumber PAD, menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diharapkan PAD yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut. Selain itu, PAD memiliki kemampuan untuk memungkinkan pemerintah daerah untuk tetap mandiri sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Opini Audit

Opini audit adalah pernyataan pendapat yang dibuat oleh seorang auditor saat menilai kesesuaian perjanjian laporan keuangan yang diauditnya. Salah satu cara stakeholder menilai kinerja perusahaan, khususnya kemampuan perusahaan untuk bertahan di masa depan, adalah dengan melihat opini audit. Opini audit sangat membantu pengguna laporan keuangan membuat keputusan. Investor yang ingin melakukan investasi harus memahami situasi keuangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya (Haryanto & Sudarno, 2019).

Belanja Modal

Belanja modal, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, adalah pengeluaran anggaran untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk belanja tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh provinsi, kabupaten, atau kota. Ini termasuk urusan yang harus dilakukan dan pilihan, serta urusan yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan secara hukum.

Pengembangan Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Putri dan Darmayanti (2019), PAD adalah pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD lainnya yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD kemudian diberikan ke pos pembiayaan yang berfokus pada layanan masyarakat (Heryanti *et al.*, 2019). Ini memberi pemerintah daerah lebih banyak kemandirian, memungkinkan mereka untuk tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi ini juga akan berdampak pada reputasi pemerintah, karena reputasi pemerintah daerah sangat penting untuk memperoleh kepercayaan masyarakat yang diharapkan dapat menciptakan hubungan dan peran masyarakat yang positif dalam pembangunan daerah. Hipotesis pertama yang dihasilkan dari penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pernyataan profesional yang dibuat oleh pihak berwenang sebagai hasil dari pemeriksaan keuangan pada laporan keuangan dikenal sebagai opini. Opini audit mempengaruhi tingkat kewajaran informasi, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai akuntabilitas pemerintah. Opini audit juga mempengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pelaporan keuangan (Ditasari & Sudrajat, 2020). Orang akan lebih percaya pada cara pemerintah mengelola keuangan pemerintah daerah jika opini audit pemerintah daerah menjadi lebih baik. Ini karena mereka memiliki kemampuan untuk menilai kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2: Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Anggaran yang digunakan untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat selama lebih dari satu periode akuntansi disebut belanja modal. Peningkatan persentase alokasi belanja modal menunjukkan peningkatan produktivitas pemerintah daerah karena aset yang dihasilkan selalu terkait dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum (Suandani & Astawa, 2021). Belanja modal pemerintah daerah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli, membeli, atau membayar aset tetap berwujud yang menguntungkan untuk kegiatan pemerintahan dan bermanfaat bagi masyarakat. Objektif tetap ini didistribusikan secara proporsional kepada masyarakat. Pratiwi (2016) melakukan

penelitian tentang belanja modal pada tahun 2018 dan menemukan bahwa ada korelasi positif antara belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, hipotesis berikut diajukan:

H3: Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan merupakan Laporan Keuangan yang diperoleh dari BPK. Populasi yang digunakan yaitu seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38, terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Penelitian ini memiliki rentang waktu empat tahun, yaitu 2018-2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2018-2021. Uji statistik dilaksanakan menggunakan aplikasi IBM SPSS.

Tabel 1.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Keterangan Pengukuran
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD yang dihasilkan pemerintah daerah diharapkan mampu mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya dengan menggali potensi daerah yang ada.</p> <p>Data diperoleh dari realisasi pendapatan asli daerah selama 4 tahun periode 2018 sampai dengan 2021. Pengukuran yang digunakan adalah satuan angka. Data diperoleh dari laporan keuangan Provinsi Jawa Timur yang sudah di audit oleh BPK.</p>
Opini Audit	<p>Menurut PSA 29 SA Seksi 508 dalam Standar Profesional Akuntan Publik, ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu: Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>), Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan (<i>Unqualified Opinion With Explanatory Language</i>), Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>), Pendapat Tidak Wajar (<i>Adverse Opinion</i>), dan Menolak Memberikan Pendapat (<i>Disclaimer Opinion</i>) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).</p> <p>Opini Audit diukur dengan menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut: Wajar Tanpa Pengecualian = 5; Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan = 4; Wajar Dengan Pengecualian = 3; Tidak Wajar = 2; dan Menolak Memberikan Pendapat atau Tidak Memberikan Pendapat = 1</p>

Belanja Modal	Belanja modal merupakan belanja yang bersumber dari anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan demi memperoleh aset tetap atau aset lain yang mampu memberikan keuntungan selama lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik. Data diperoleh dari realisasi pendapatan asli daerah selama 4 tahun periode 2018 sampai dengan 2021. Pengukuran yang digunakan adalah satuan angka. Data diperoleh dari laporan keuangan Provinsi Jawa Timur yang sudah di audit oleh BPK.
Kinerja Keuangan	Kinerja keuangan Instansi Pemerintah dapat disebut juga sebagai hasil dari suatu sistem pengelolaan keuangan mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Nasution, 2019). Untuk kinerja keuangan, ditentukan menggunakan rumus kemandirian keuangan daerah yang berupa: $\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1.2 Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Kinerja	152	1,63	13,51	6,4636	2,31930
LN_BelanjaModal	152	24,96	30,41	26,5171	0,70576
LN_PAD	152	25,60	29,31	26,6158	0,71263
LN_OPINIAUDIT	152	0,00	1,61	1,5760	0,17387

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 152 sampel data yang terdiri 38 kabupaten/kota dikalikan dengan periode penelitian selama 4 tahun. Berdasarkan tabel deskriptif statistik diatas maka diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata (*mean*) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 26,6158 dan standar deviasi sebesar 0,71263, dengan nilai minimum 25,60 yang dimiliki oleh kota Pasuruan di tahun 2021. Lalu untuk variabel Opini audit memiliki mean sebesar 1,5760 dan standar deviasi sebesar 0,17387, dengan nilai minimum sebesar 0,00 atau nilai untuk opini audit Tidak Memberikan Pendapat yang diperoleh kabupaten jember pada tahun 2019. Variabel Belanja Modal memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,5171 dan memiliki standar deviasi sebesar 0,70576, dengan nilai minimum sebesar 24,96 yang dimiliki oleh Kota Probolinggo di tahun

2021. Pada variabel kinerja, rata-rata nilai yang dimiliki adalah sebesar 6,4636 dengan standar deviasi 2,31930 dan nilai minimum sebesar 1,63.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1.3 Hasil Uji Normalitas

<i>Unstandardized Residual</i>	
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikan dari residual yang dapat dilihat dari *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200. Artinya bahwa nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Pendapatan Asli Daerah (X1)	0,969	1,032
Opini Audit (X2)	1,000	1,000
Belanja Modal (X3)	0,968	1,033

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen nilai VIF kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,100. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen bebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 1.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>Sig.</i>
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	0,763
Opini Audit (X ₂)	0,858
Belanja Modal (X ₃)	0,719

Tabel 1.5 menunjukkan hasil uji heterokedisitas seluruh variabel bebas penelitian. Nilai signifikan dari variabel PAD (X1) sebesar 0,763 variabel Opini Audit (X2) memiliki nilai signifikan 0,858, Variabel Belanja Modal (X3) memiliki nilai signifikan 0,719. Nilai signifikan dari uji heterokedisitas menunjukkan variabel-variabel di atas telah memenuhi asumsi heterokedisitas atau tidak mengindikasikan terjadinya heterokedisitas. Asumsi tersebut didasarkan pada uji glejser yang mensyaratkan tidak terjadinya heterokedisitas memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 ($>0,05$).

Uji Autokorelasi

Tabel 1.6 Hasil Uji Autokorelasi

Model	<i>Durbin-Watson</i>
1	1,783

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 1.6 menunjukkan bahwa hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai d sebesar 1,783. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson (k, n) yang mana k menunjukkan jumlah variabel independen yaitu 3 variabel dan n adalah jumlah sampel sejumlah 152 sampel. Nilai dL tabel menunjukkan 1,6948, nilai dU tabel menunjukkan 1,7752 dan nilai $4-dU$ sebesar 2,2248, maka nilai $dU < DW < 4-dU$ ($1,7752 < 1,7831 < 2,2248$) sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dan lolos dari uji autokorelasi.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Koefisien Determinasi

Tabel 1.7 Hasil Uji *R-Square*

Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,518

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 26 pada tabel diperoleh nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,518. Hal tersebut berarti bahwa variabel pendapatan asli daerah, opini audit, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh sebesar 51,8%, sedangkan sisanya sebesar 48,2% merupakan variabel yang diteliti di luar penelitian ini.

Uji F

Tabel 1.8 Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1 <i>Regression</i>	55,134	0,000

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 26 pada tabel diperoleh nilai F hitung sebesar 55,134 dan nilai signifikansi menunjukkan lebih kecil dari alpha (0,05) yaitu sebesar 0,000 maka dengan demikian dapat diketahui bahwa secara simultan belanja modal, opini audit dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah.

Uji Hipotesis

Tabel 1.9 Hasil Uji T

Model	<i>Unstandardized B</i>	<i>Coefficients Std. Error</i>	<i>Standardized Coefficients Beta</i>	t	Sig.	
1	(Constant)	48,909	5,724	8,544	0,000	
	PAD	1,261	0,227	-0,879	-12,623	0,000
	Opini Audit	0,176	0,755	0,013	0,233	0,816
	Belanja Modal	1,261	0,229	0,384	5,517	0,000

Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai t hitung untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada hasil tabel diatas adalah sebesar -12,623 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan t tabel sebesar 1,655 yang berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Darmayanti, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan PAD yang tinggi seharusnya memiliki kinerja keuangan yang baik juga. Namun, pemerintah daerah dengan PAD yang tinggi tetapi tidak memiliki kinerja keuangan yang baik, diharapkan untuk memperbaiki diri mereka di masa depan. Untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah harus lebih mempelajari dan melihat sumber daya yang tersedia. Ini akan memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan semua potensi daerah untuk memperoleh pendapat, bukan hanya satu pendapatan.

Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai t hitung untuk variabel Opini audit pada hasil tabel diatas adalah sebesar 0,233 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,816 dan t tabel sebesar 1,655 yang berarti bahwa variabel Opini audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suandani dan Astawa (2021) mengatakan bahwa teori keagenan menjelaskan hubungan agen dengan principal. Menurut teori ini, pemerintah selaku agen harus terus berusaha menerapkan pengelolaan keuangan dengan baik dan selalu bertanggung jawab untuk mendapatkan opini audit yang baik. Opini audit yang lebih baik dari pemerintah daerah akan membuat masyarakat lebih percaya dengan pemerintah untuk mengelola keuangan pemerintah daerah, yang kinerja keuangannya dapat diukur dengan membandingkan kinerja keuangan sebelumnya dan sekarang. Rasio kinerja keuangan ini dapat digunakan untuk menentukan seberapa efektif layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai t hitung untuk variabel Belanja Modal pada hasil tabel diatas adalah sebesar 5,517 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan t tabel sebesar 1,655 yang berarti bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemda terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Suandani dan Astawa, (2021) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi. Alokasi belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum, sehingga jumlah alokasi tahunan harus relatif besar. Ini karena penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Semakin besar persentase alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil-hasil yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu berdampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Perlu adanya perhatian lebih dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan.

2. Opini Audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hasil ini menunjukkan bahwa opini audit yang baik dapat memberikan dampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan belanja modal untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa belanja modal digunakan secara efektif untuk menciptakan aset yang memberikan manfaat jangka panjang.
4. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, dan Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan dan meningkatkan pengelolaan ketiga variabel tersebut secara bersama-sama untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal.

Pemerintah daerah harus menilai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap kinerja keuangan. Untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah tanpa mengorbankan produktivitas dan efisiensi, diperlukan pendekatan yang efisien. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan mereka. Pemerintah daerah dapat memperoleh kepercayaan dari publik dan pemangku kepentingan lainnya dengan memastikan opini audit yang baik. Pemerintah daerah juga harus mengelola belanja modal dengan baik. Untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan hasil yang optimal dalam jangka panjang, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan belanja modal harus diperkuat.

Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis lebih mendalam terkait faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat dilakukan dengan fokus pada daerah-daerah lain di Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dan mengenalkan variabel-variabel lain ke dalam penelitian seperti variabel moderasi, variabel mediasi, atau variabel kontrol, dan sebagainya untuk memperoleh hasil yang berbeda

DAFTAR REFERENSI

- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali-Indonesia Negara adalah wilayah yang ditempati masyarakat dan memiliki suatu organisasi yang berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan negara . *E-Jurnal Manajemen*, 7(2), 1080–1110.
- Atmoko, C. A., & Khairudin. (2022). Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 291–296. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1295>
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 104. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7668>
- Djarmika, G. H. (2022). The Effect of Regional Original Income and Balancing Funds on The Allocation of Capital Expenditures in Regencies/Cities of North Sumatra Province. *Journal Neuro Quantology*, 20(7), 107–114. <https://doi.org/10.14704/nq.2022.20.7.NQ33013>
- Endiana, I. D. M., & Suryandari, N. N. A. (2021). Opini Going Concern: Ditinjau Dari Agensi Teori Dan Pemicunya. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(2), 224–242. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i2.4490>
- Haryanto, Y. A., & Sudarno. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, dan Rasio Pasar terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–13.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(8), 1–21.
- Kusumasari, K. R., & Kartika, I. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 645–667.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 5(2), 523–531. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>
- Nasution, D. A. D. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Pradnyani, N. M. D., & Mimba, N. P. S. H. (2020). Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Realisasi PAD sebagai Pemediasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(12), 3150. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i12.p12>
- Pratiwi, T. Y. (2016). *Pengaruh Pad , Dana Perimbangan , Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah 2012-2016 the Effect of Pad , Intergovernmental Revenue , Capital Expenditures Toward Financial Performance of Central Java Year 2012-2016*. 1–15.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-*

Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 8(5), 2834.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>

- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–20.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3620>
- Rasyid, Y., Suci, R. G., & Putri, A. M. (2022). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 10(2), 80–93. <https://doi.org/10.24127/pro.v10i2.6589>
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). *PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*. 8(8), 4759–4787.
- Suandani, K. P., & Astawa, G. P. B. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 2614–1930.
- Triyuwono, E. (2018). Proses Kontrak, Teori Agensi dan Corporate Governance (Contracting Process, Agency Theory, and Corporate Governance). *SSRN Electronic Journal*, 1–14.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3250329>
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.